

**EVALUASI PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) UNTUK
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN
PADA KECAMATAN PRACIMANTORO
KABUPATEN WONOGIRI**

JURNAL



Oleh

Agustina Wulandari

NIM. 160.100.033

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWASTA MANDIRI
SURAKARTA**

2019

**EVALUASI PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) UNTUK
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN
PADA KECAMATAN PRACIMANTORO
KABUPATEN WONOGIRI**

Agustina Wulandari

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swasta Mandiri
Surakarta

ABSTRAKSI

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan salah satu bentuk penerapan *E-Government* dalam rangka mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan pengelolaan keuangan yang bersih, efektif dan efisien sesuai konsep *value for money*. Pemerintah Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri menerapkan SIPKD dalam pengelolaan keuangan daerah sejak tahun 2014. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pengelolaan keuangan yang transparan, efektif dan efisien disamping laporan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel dan auditabel.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Aplikasi Sistem Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Pemerintah Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri, apakah masih memerlukan perbaikan sistem. Hasil Analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa analisis penerapan SIPKD pada Pemerintah Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor : 270/PMK.05/2014 menunjukkan saat menjalankan aplikasi SIPKD secara bersamaan, proses menjadi sangat lambat bahkan kadang error hal ini dikarenakan bandwidth server kurang besar dan tidak ada peringatan (*warning system*) dari aplikasi SIPKD pada saat terjadi kesalahan proses input data.

Berdasarkan penemuan yang diungkapkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem SIPKD) pada Pemerintah Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri sudah berjalan dengan baik. Tetapi terdapat beberapa hal yang masih harus diperbaiki. Sebaiknya pengelola server pusat perlu menambah kapasitas bandwidth server sehingga saat dipakai bersamaan seluruh OPD aplikasi tetap berjalan lancar dan perlu dilakukan penyempurnaan sistem operasi aplikasi SIPKD.

Kata kunci : Evaluasi, Sistem Informasi, SIPKD

ABSTRACT

Local Government Financial Management Information System (SIPKD) is one form of E-Government implementation in order to push the local government to apply a clean, effective and efficient financial management accordance with the values of money concept. Government of the District of Pracimantoro in Wonogiri Regency implemented Local Government Financial Management Information System in the local financial management since 2014. This is done to obtain the benefits of transparent, effective, and efficient financial management as well as accountable and auditable accountability reports.

This study aims to evaluate the Application of the Regional Financial Management Information System (SIPKD) to the Government of the District of Pracimantoro in Wonogiri Regency, whether it still needs system improvement. The results of the analysis in this study indicate that the analysis of the application of SIPKD in the Government of the District of Pracimantoro in Wonogiri Regency based on the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, Number: 270 / PMK.05 / 2014 shows that when running SIPKD applications simultaneously, the process becomes very slow server bandwidth is not large and there is no warning system from the SIPKD application when there is an error in the data input process.

Based on the findings revealed above, it can be concluded that the implementation of the SIPKD system in the Government of the District of Pracimantoro in Wonogiri Regency has been going well. But there are some things that still need to be corrected. We recommend that the central server manager needs to increase server bandwidth capacity so that when used together all OPD applications continue to run smoothly and need to be improved SIPKD Application Operating System.

Keyword :Evaluation, Information Systems, SIPKD

I. PENDAHULUAN

Kecamatan Pracimantoro merupakan salah satu dari 25 Kecamatan di Kabupaten Wonogiri yang memiliki visi “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Yang baik”, serta misi:

1. Meningkatkan kinerja pemerintahan kecamatan
2. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Setiap akhir tahun anggaran Kepala OPD (organisasi perangkat daerah) selaku Pengguna Anggaran wajib melaporkan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan APBD (Anggaran pendapatan dan belanja daerah) yang tertuang dalam laporan keuangan. Sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) laporan keuangan disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah daerah membutuhkan laporan keuangan guna perencanaan, pengendalian dan pengambilan kebijakan. Kecamatan Pracimantoro merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah

Kabupaten Wonogiri, yang berarti laporan keuangan yang disajikan oleh Kecamatan Pracimantoro merupakan unsur penting dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri secara keseluruhan. Sehingga laporan keuangan yang disajikan harus akurat dan handal. Maka peneliti tertarik melakukan penelitian ini dengan judul “Evaluasi Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Untuk Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Pada Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri.”

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

1. Pengertian Sistem Informasi Keuangan

Menurut Romney (2015:4) Informasi (*information*) adalah data yang telah dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Sebagaimana perannya, pengguna membuat keputusan yang lebih baik sebagai kuantitas dan kualitas dari peningkatan informasi.

Menurut pendapat Syarifudin (2005:89) definisi pengelolaan keuangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menggerakkan para pejabat yang bertugas dalam bidang keuangan untuk menggunakan fungsi-fungsi manajemen, meliputi perencanaan atau penganggaran, pencatatan, pengeluaran serta pertanggungjawaban.

2. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Definisi Akuntansi Sektor Publik menurut Bastian (2006:15) adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:2) mendefinisikan akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik.

Menurut Abdul Halim (2012:3) Akuntansi Sektor Publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Sesuai dengan definisi-definisi diatas, dari sudut pandang ekonomi sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas (kesatuan) yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik Mardiasmo, (2009;33).

3. Definisi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengertian pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan keuangan yang bertumpu / berfokus pada kepentingan publik (public oriented). Hal ini tercermin dari besarnya jumlah alokasi anggaran untuk kepentingan publik serta jumlah partisipasi masyarakat yang ikut dalam

perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan keuangan daerah. Maka dari itu, pengelolaan daerah diharuskan untuk transparan dan mempunyai akuntabilitas yang tinggi sehingga tercipta pengelolaan daerah yang efektif dan efisien. (Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).

4. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi pemerintahan atau SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah. Laporan tersebut seperti misalnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Standarisasi ini dilakukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan. Sekaligus untuk memberikan peningkatan kualitas dari LKPP dan LKPD.

Secara umum SAP berbentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang memiliki judul, nomor, dan tanggal efektif berlaku standar tersebut. Selain itu SAP juga memiliki Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang menjadi rangka penyusunan.

5. Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam akuntansi pemerintahan laporan keuangan terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
yaitu laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
- b. Laporan Operasional
yaitu laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.
- c. Neraca
yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dan per tanggal tertentu.
- d. Catatan atas laporan keuangan
Yaitu penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan Neraca.

6. Gambaran Umum Objek Penelitian

Berdasarkan data BPS Kabupaten Wonogiri(2016), secara geografis, Pracimantoro merupakan kecamatan letaknya diujung selatan daerah geografis Kabupaten Wonogiri dengan ketinggian 253m diatas permukaan laut dan merupakan daerah bukit lipatan batuan kapur dengan stuktur tanah yang didominasi oleh *aosiasi litosal mediteran* coklat asam.

Jarak dari Pusat Ibu Kota Kabupaten Pracimantoro ± 35 Km yang di hubungkan oleh jalan Kabupaten dengan batas-batas wilayah kecamatan sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi DIY
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Giritontro
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Eromoko
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi DIY

Alamat kantor kecamatan pracimantoro adalah Jl.raya Pracimantoro, Wonogiri Km 1, nomor telepon dan fax (0273) 461641.

III. PEMBAHASAN

1. Proses penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Pracimantoro dengan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Dokumen sumber yang digunakan dalam aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah(SIPKD) adalah :

- a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berisi program kegiatan dan jumlah anggaran yang dibutuhkan.
- b. Dokumen Realisasi Anggaran yang berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), STS (Surat tanda setor).

Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah akan menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual berupa :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yaitu laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
- b. Laporan Operasional, yaitu laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.
- c. Neraca yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu.
- d. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan Neraca.

Secara garis besar aplikasi SIPKD terdiri dari 3 (tiga) tahap :

- a. Penganggaran
- b. Penatausahaan
- c. Pertanggungjawaban

2. Tahap Penganggaran

Pada tahap ini operator SIPKD menginput data perencanaan anggaran yaitu Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS). Selanjutnya apabila KUA PPAS telah menjadi RKA (Rencana Kerja Anggaran) operator menginput kembali dalam aplikasi setelah RKA disahkan menjadi APBD maka OPD (Organisasi perangkat

Daerah) menyusun DPA-OPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). DPA OPD yang telah disusun diinput dalam aplikasi. Dapat digambarkan seperti di bawah ini:



Sumber : Kecamatan Pracimantoro

3. Tahap Penatausahaan

Tahap penatausahaan terdiri dari penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran. Karena OPD Kecamatan Pracimantoro tidak ada penerimaan maka yang kami bahas dalam tahap ini adalah penatausahaan pengeluaran.

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 untuk proses pelaksanaan APBD dimulai sejak disusunnya DPA SKPD sampai dengan pertanggungjawaban dari penggunaan/perencanaan. Pada OPD Kecamatan Pracimantoro dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran terdapat dua metode belanja yaitu belanja yang menggunakan UP/GU (Uang Persediaan/Ganti Uang) dan menggunakan LS (Langsung).

4. Tahap Pertanggungjawaban

Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai suatu entitas akuntansi harus mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pengelolaan atas anggaran yang diberikan. Sebagai konsekuensi dari adanya desentralisasi tanggungjawab pengelolaan keuangan kepada SKPD sesuai dengan kewenangannya, maka SKPD harus membuat laporan hasil pengelolaan anggarannya dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran SKPD (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca SKPD dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Untuk dapat masuk kedalam modul ini klik icon modul Pertanggungjawaban sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut ini :



Gambar Menu Utama

- a. **Bukti Memorial**

Bukti memorial merupakan transaksi-transaksi yang bersifat penyesuaian atas transaksi-transaksi. Dalam menu ini proses yang dilakukan adalah pembuatan Bukti Memorial.

Yang perlu diperhatikan adalah setelah pengisian bukti memorial selesai dilakukan, maka transaksi yang telah dimasukkan tersebut haruslah seimbang (balanced) karena pencatatan yang dilakukan adalah sistem pencatatan berpasangan (*double entry system*), dalam aplikasi untuk menguji kebenarannya dapat dilihat bahwa 'Tanggal BM' berwarna merah, klik sebanyak satu kali pada nomor BM, apabila warna merah tersebut berubah menjadi coklat, artinya bahwa transaksi yang dimasukkan sudah benar, namun apabila tampil pesan 'transaksi belum balance' maka perlu diperhatikan kembali transaksi yang telah dimasukkan, lakukan proses edit nilai transaksi, klik tombol 'Edit' yang ada disebelah kanan nilai, kemudian ketikkan nilai yang benar dan klik tombol 'Update' untuk menyimpan data.
- b. **Anggaran**

Sub Menu Anggaran pada Menu Memorial ini berguna untuk membuat Jurnal Anggaran yang akan menyajikan berapa nilai Estimasi Pendapatan dan nilai Apropriasi Belanja yang tercantum pada DPA yang telah disahkan.
- c. **Jurnal Penutup**

Jurnal Penutup dalam menu Memorial ini digunakan untuk menutup Jurnal Anggaran, Jurnal LRA, Jurnal Surplus/Defisit LRA, dan Jurnal LO.
- d. **Jurnal LRA**

Jurnal Belanja UP merupakan jurnal yang berfungsi untuk mencatat seluruh transaksi-transaksi Pengeluaran kas. Dokumen sumber untuk mencatat transaksi ini adalah SPJ
- e. **Jurnal LO**

Jurnal LO ini mencatatkan secara otomatis transaksi-transaksi yang telah diinputkan pada proses penatausahaan. Sub Menu Jurnal LO terdiri dari Jurnal Pendapatan, Jurnal SP2D, Jurnal Belanja UP, Jurnal Memorial, Jurnal Pengembalian Belanja, dan Jurnal BAST (Jurnal ini tidak terdapat di menu Jurnal LRA, hanya ada pada menu Jurnal LO). Secara Aplikasi proses pengecekan dan proses memvalidasi jurnal pada Menu Jurnal LO ini adalah sama dengan penjelasan sebelumnya pada sub Menu di Menu Jurnal LRA.
- f. **Cetak**

Pada menu cetak terdiri dari :

 - 1) **Setting**
 - a) **Saldo Awal**

Menu ini berfungsi untuk memasukkan nilai saldo awal neraca sebelum dilaksanakannya proses perhitungan akhir tahun. Cara untuk membuat setting saldo awal dengan menggunakan aplikasi dilakukan dengan memilih menu cetak sub menu setting saldo

awal.

b) Pengesahan Pelaporan

Cara untuk membuat setting Pengesahan Pelaporan dengan menggunakan aplikasi dilakukan dengan memilih menu cetak sub menu setting pengesahan pelaporan.

- 2) Register
- 3) Jurnal
- 4) Buku Besar
- 5) Neraca Saldo
- 6) Laporan Keuangan
- 7) Kertas Kerja
- 8) Perda Pertanggungjawaban

5. Musrenbang Kota/ Kabupaten

Pada tahap ini operator Aplikasi mencermati lagi semua program atau kegiatan yang sudah disetujui, apakah ada perubahan nama kegiatan menjadi nama baru, atau ada penggabungan kegiatan, penambahan kegiatan. Apabila ada maka Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa mengusulkan ke BAPPEDA. Selanjutnya para para Kasie dan Kasubang sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) membuat Pra RKA yang besaran paguny sesuai dengan Usulan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, hasil dari Dokumen Pra RKA tersebut akan di desk kan dengan pihak BAPPEDA. Apakah ada kegiatan yang perlu ditambah atau dikurangi pagu anggaranya sesuai dengan kebijakan Pembangunan Bupati pada saat itu. Sehingga dihasilkan Dokumen RKPD Tahun 2019. Data yang sudah disetujui akan ditransfer pihak BAPPEDA ke tahapan selanjutnya yaitu RKPD, dimana data kegiatan dan program tidak dapat dirubah lagi.

6. RKPD dan KUA PPAS

Pada tahap ini operator dapat mengetahui hasil laporan berupa usulan program dan kegiatan per OPD, rekapitulasi Anggaran Sementara berdasarkan Urusan. Selanjutnya dengan disetujuinya Program dan Kegiatan berdasarkan pagu maka akan didapatkan Plafon program dan Kegiatan/KUA PPAS dan PPAS Perubahan. Pada tahap ini Dinas Permberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki RKA / Rencana Kerja dan Anggaran untuk Tahun 2019.

7. SIMONEV

Merupakan Aplikasi dalam rangka pelaksanaan evaluasi RKPD Tahun bersangkutan (2018), operator aplikasi melakukan inputing atau pengisian data realisasi triwulanan meliputi realisasi kinerja (k) dan keuangan (rp) sekaligus pelaksanaan Kegiatan tahun 2017 dan target Renstra s.d Tahun 2020. Data yang diinput merupakan hasil dari Realisasi Laporan pelaksanaan kegiatan berupa target Keuangan dan Fisik Kegiatan.

8. E-SAKIP

Tahap awal pengisian E-SAKIP adalah operator aplikasi melakukan inputing/ pengisian data dalam menu Renstra yang berisi :

- a. Visi,
- b. Misi,
- c. Tujuan,
- d. Sasaran,
- e. Indikator Kinerja Sasaran,
- f. Strategi, Kebijakan,
- g. Program yang meliputi: Program, Penanggung Jawab Program / Kepala Bidang, Anggaran Program, Indikator Kinerja Program, Target Indikator Kinerja Program.

Kegiatan yang meliputi : Kegiatan, Penanggung Jawab Kegiatan / Kepala seksi / PPK (Pejabat Pembuat Komitmen, Anggaran Kegiatan, Output Kegiatan, Target Output Kegiatan.

Pada tahun berjalan / Tahun 2018 Operator Aplikasi mengisi Target RKT Tahunan dan Target PK, selanjutnya operator mengisi Kinerja setiap triwulanan berupa penyerapan anggaran program dan kegiatan. Sehingga menghasilkan laporan pengukuran kinerja. Dapat dilihat pada menu laporan.

9. SiRUP

Tahap awal yang dilakukan oleh operator adalah login Admin dapat mengakses aplikasi SiRUP dengan alamat <https://sirup.lkpp.go.id>. Setelah login admin mendaftarkan PPK, langkah selanjutnya masing-masing PPK tersebut memasukan data kegiatan. Kegiatan yang diinput dimasukan aplikasi sesuai dengan cara pengadaannya yaitu swakelola atau penyedia. Adapun kegiatan yang termasuk swakelola adalah Honorarium, Uang Lembur, Perjalanan Dinas, sedangkan kegiatan yang termasuk penyedia adalah : Uang Makan dan Minum, Penggandaan, ATK.

Untuk dana yang lebih dari Rp. 200.000.000,00, pihak admin harus melaporkan kegiatan tersebut untuk dilelang. Data kegiatan yang telah diinput dalam aplikasi akan menghasilkan laporan RUP (Rencana Umum Pengadaan).

Alur atau tahapan proses penyusunan RKPD Kabupaten Wonogiri tahun dilakukan melalui tahapan :

1. Persiapan Penyusunan RKPD, Kegiatan yang dilakukan meliputi (a) penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD, (b) penyusunan agenda tim penyusun RKPD serta (c) penyiapan data dan informasi.
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD, Kegiatan yang dilakukan meliputi (a) pengolahan data dan informasi, (b) analisis gambaran umum kondisid aerah, (c) analisis ekonomi dan keuangan daerah, (d) evaluasi kinerja tahun sebelumnya, (e)penelaahan terhadap kebijakan pemerintah, (f) penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, (g) perumusan permasalahan pembangunan daerah, (h) perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, (i) perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif, (j) perumusan program

- prioritas beserta pagu indikatif, (k) pelaksanaan forum konsultasi publik, (l) penyesuaian rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.
3. Penyusunan Rancangan RKPD, Tahapan ini merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal RKPD. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi penyusunan (a) plafon indikatif SKPD, (b) penyusunan rancangan Renja SKPD, (c) Forum SKPD, (d) verifikasi Renja SKPD dan (e) penyajian Rancangan RKPD.
 4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD, Musrenbang RKPD dilaksanakan guna menajamkan, menelaraskan dan mencari kesepakatan terhadap Rancangan RKPD, meliputi : (a) usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten, (b) Kebijakan, prioritas program, kegiatan dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi, (c) indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan kabupaten (d) prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja pendanaan dan sinergitas dengan RKP.
 5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD, Hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten dan Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Tengah dan Musrenbang Nasional RKP Tahun 2016 menjadi bahan masukan bagi penyusunan Rancangan Akhir RKPD
 6. Penetapan RKPD, Mengacu pada ketentuan yang ada RKPD ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah paling lambat Minggu keempat Bulan Mei.

Skema alur Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Wonogiri telah menggunakan e-planning melalui Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) yang berbasis webbase sehingga SKPD dapat menginput rencana kerja SKPD dan kecamatan dapat menginput langsung hasil musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan.

IV. TEMUAN DAN REKOMENDASI

1. Temuan

Berdasarkan penjelasan tentang penerapan aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) di Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri pada Bab III maka peneliti dapat menyimpulkan adanya beberapa temuan, yaitu :

- a. Saat menjalankan aplikasi SIPKD secara bersamaan, proses menjadi sangat lambat bahkan kadang error hal ini dikarenakan bandwidth server kurang besar. Sehingga operator aplikasi SIPKD harus ke pusat server di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) supaya bisa menginput data dengan cepat dan bahkan terkadang operator aplikasi SIPKD harus menginap di BPKD.
- b. Tidak ada peringatan (*warning system*) dari aplikasi SIPKD pada saat terjadi kesalahan proses input data sehingga laporan yang dihasilkan juga salah untuk melakukan pembetulan operator harus mengulang dari tahap akhir ke tahap awal, sehingga operator harus melakukan dua kali kerja. Hal ini membutuhkan waktu yang lama dan bertentangan dengan tujuan

penerapan aplikasi SIPKD yaitu untuk mempercepat proses pengolahan dan pelaporan.

2. Rekomendasi

Berdasarkan temuan di atas, maka rekomendasi yang dapat penulis ajukan adalah :

- a. Pengelola server pusat perlu menambah kapasitas bandwidth server sehingga saat dipakai bersamaan seluruh Organisasi Perangkat Daerah aplikasi tetap berjalan lancar.
- b. Perlu dilakukan penyempurnaan sistem operasi aplikasi SIPKD sehingga apabila terjadi kesalahan pada saat tahapan input data, operator tidak perlu mengulang proses dari tahap akhir ke tahap awal.

V. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan di atas maka kesimpulan penelitian ini adalah :

- a. Mengingat fungsi laporan Keuangan adalah sebagai laporan pertanggung jawaban kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri, laporan keuangan Kecamatan Pracimantoro harus diproses dan menghasilkan informasi secara cepat, teliti, akurat dan disampaikan tepat waktu.
- b. Aplikasi SIPKD ini masih dalam pengembangan, sehingga masih ada kekurangan - kekurangan. Akan tetapi dibalik kekurangan yang ada aplikasi ini sangat membantu dalam penyusunan laporan keuangan Kecamatan Pracimantoro. Selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2015-2017 Pemerintah Kabupaten Wonogiri mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Sehingga Pemerintah Kabupaten Wonogiri terus meningkatkan kinerja untuk mempertahankan Opini WTP.

2. Saran

Dari kesimpulan penelitian diatas saran yang kita berikan antara lain:

- a. Operator dan Sistem aplikasi SIPKD adalah hal pokok dalam proses penyusunan laporan keuangan, sehingga kemampuan operator harus terus ditingkatkan dengan mengikutsertakan dalam bimtek teknis setiap tahun.
- b. Hasil penelitian untuk sistem aplikasi SIPKD secara umum sudah berjalan baik, namun secara khusus perlu adanya peningkatan di bandwidth servernya sehingga proses penginputan dapat berjalan dengan cepat dan penyempurnaan sistem untuk mendeteksi adanya kesalahan penginputan operator tidak perlu bekerja dua kali untuk memperbaiki kesalahan

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat

Indra, Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.

Mardiasmo. 2009. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Offset

Romney, Marshall B. dan Steinbart. 2015. *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi 13, Alih Bahasa: Kikin Sakinah Nur Safira dan Novita Puspasari. Jakarta : Salemba Empat

Syarifudin. 2005. *Administrasi Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia

https://simonev.ristekdikti.go.id/Petunjuk_Teknis_SIMonev_Rev4.pdf

<https://sirup.lkpp.go.id>

_____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah